



## **EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI SD NEGERI 1 UBUNG : ANALISIS ASPEK *INPUT* DAN *PROCESS* DENGAN MODEL CIPP**

**Ni Desak Made Kartini Dwitya<sup>1\*</sup>, Rahmatul Izzati<sup>2</sup>, Mahirudin<sup>3</sup>, Nuzile<sup>4</sup>, & Candra<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,&5</sup>Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Pascasarjana, Universitas Mataram, Jalan Majapahit Nomor 62, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125, Indonesia

\*Email: [dskartinidwitya@gmail.com](mailto:dskartinidwitya@gmail.com)

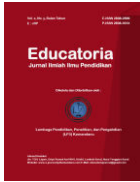
Submit: 08-04-2026; Revised: 19-04-2026; Accepted: 21-04-2026; Published: 29-04-2026

**ABSTRAK:** Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan kebijakan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi siswa kurang mampu. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi PIP di SD Negeri 1 Ubung, Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan fokus pada dimensi *input* dan *process* dalam model evaluasi CIPP. Aspek *input* menekankan pada kesiapan sumber daya dan strategi, sementara aspek *process* menyoroti dinamika pelaksanaan di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam bersama kepala sekolah dan dokumentasi arsip sekolah yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan realitas implementasi program. Hasil penelitian pada dimensi *input* menunjukkan kesiapan operasional yang memadai, didukung oleh validitas data Dapodik-DTKS, pemahaman regulasi yang baik, serta pemanfaatan media komunikasi yang efektif bagi wali murid di SD Negeri 1 Ubung. Namun, pada dimensi *process*, terdapat hambatan teknis administratif yang berdampak pada keterlambatan penyaluran dana. Sekolah mengatasi kendala tersebut melalui pendampingan administratif yang intensif dan pengawasan preventif oleh kepala sekolah untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun aspek *input* telah memenuhi standar, keberhasilan PIP di SD Negeri 1 Ubung sangat bergantung pada kemampuan sekolah dalam mengelola hambatan teknis administratif selama proses implementasi.

**Kata Kunci:** Evaluasi Kebijakan Pendidikan, Evaluasi Program, Model CIPP, Program Indonesia Pintar (PIP), Studi Kasus Sekolah Dasar.

**ABSTRACT:** The Smart Indonesia Program (PIP) is a strategic policy to expand access to education for underprivileged students. This study aims to evaluate the implementation of PIP at SD Negeri 1 Ubung, West Nusa Tenggara (NTB), focusing on the input and process dimensions of the CIPP evaluation model. The input aspect emphasizes resource readiness and strategies, while the process aspect highlights the dynamics of implementation in the field. The research method used was descriptive qualitative, with data collected through in-depth interviews with the principal and school archive documentation, which were then analyzed descriptively to illustrate the reality of program implementation. The results of the input dimension indicate adequate operational readiness, supported by valid Dapodik DTKS data, a good understanding of regulations, and effective use of communication media for parents at SD Negeri 1 Ubung. However, in the process dimension, technical administrative obstacles occurred that resulted in delays in fund disbursement. The school addressed these obstacles through intensive administrative assistance and preventive supervision by the principal to ensure the funds were used appropriately. This study concludes that although the input aspect met standards, the success of PIP at SD Negeri 1 Ubung depends heavily on the school's ability to manage technical administrative obstacles during the implementation process.

**Keywords:** Education Policy Evaluation, Program Evaluation, CIPP Model, Smart Indonesia Program (PIP), Elementary School Case Study.



**How to Cite:** Dwitya, N. D. M. K., Izzati, R., Mahirudin, M., Nuzile, N., & Candra, C. (2026). Evaluasi Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SD Negeri 1 Ubung : Analisis Aspek *Input* dan *Process* dengan Model CIPP. *Educatoria : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(2), 360-368. <https://doi.org/10.36312/educatoria.v6i2.1244>



**Educatoria : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan** is Licensed Under a CC BY-SA [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

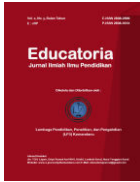
## PENDAHULUAN

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui bantuan dana pendidikan tunai. Di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), program ini menjadi instrumen penting mengingat masih terdapat kesenjangan akses pendidikan, keterbatasan sarana prasarana sekolah, serta kondisi geografis dan kerentanan sosial-ekonomi yang berpotensi menghambat keberlanjutan sekolah bagi peserta didik. Di tengah tantangan tersebut, PIP diharapkan tidak hanya menjamin pembebasan biaya pendidikan, tetapi juga membantu pemenuhan kebutuhan belajar seperti seragam, buku, dan transportasi, sehingga risiko putus sekolah dapat ditekan (Sutikno *et al.*, 2025).

Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan di tingkat satuan pendidikan, terutama pada aspek *input* dan *process* yang menjadi fokus evaluasi dalam penelitian ini. Model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan *Stufflebeam* menawarkan kerangka yang komprehensif untuk menilai pelaksanaan program pendidikan, karena mencakup sejak perencanaan hingga hasil yang dicapai. Dalam kajian ini, dua komponen CIPP yang diperdalam adalah *input* dan *process*, mengingat keduanya secara langsung terkait dengan kesiapan sumber daya serta mekanisme pelaksanaan PIP di tingkat sekolah dasar.

Evaluasi *input* PIP akan menelaah sejauh mana data penerima, kapasitas operator, dan pemahaman regulasi sudah memadai. Validitas dan akurasi data siswa melalui sistem Dapodik menjadi krusial, karena data inilah yang menjadi dasar penetapan penerima bantuan. Kesalahan penulisan identitas, ketidakmutakhiran status sosial ekonomi, atau perubahan domisili yang tidak segera diperbarui dapat menyebabkan bantuan tidak cair atau salah sasaran. Di sisi lain, pemahaman pihak sekolah terhadap regulasi PIP mulai dari kriteria layak menerima, prosedur penyaluran, hingga kewajiban pelaporan merupakan bagian penting dari *input* program. Ketidakjelasan tafsir aturan atau minimnya sosialisasi dapat menimbulkan kesalahan prosedur, sehingga evaluasi terhadap pemahaman regulasi oleh kepala sekolah, operator, dan wali kelas menjadi penting (Amalia *et al.*, 2023).

Aspek *process* PIP mencakup seluruh rangkaian pelaksanaan, mulai dari penetapan penerima oleh pusat, pengumuman di sekolah, prosedur pencairan, hingga pendampingan administratif bagi siswa dan orang tua. Keterlambatan pencairan dapat mengurangi efektivitas bantuan, terlebih jika dana yang seharusnya digunakan pada awal tahun ajaran justru diterima setelah kebutuhan mendesak berlalu. Kendala akses fisik dan informasi bagi siswa, seperti jarak tempuh yang jauh ke pusat layanan perbankan, serta literasi administrasi yang rendah sebagian



orang tua menjadi bagian penting dari evaluasi *process*. Jika mekanisme pendampingan tidak tertata, misalnya tidak ada jadwal kolektif, tidak ada surat pengantar, atau minim sosialisasi, maka sebagian siswa berisiko tidak mengambil dana PIP meskipun sudah terdaftar sebagai penerima (Neli *et al.*, 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji efektivitas PIP dan implementasi bantuan pendidikan di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional; namun masih sedikit yang mengupas secara mendalam aspek *input* dan *process* PIP pada konteks sekolah dasar di daerah rawan keterbatasan infrastruktur seperti NTB. Belum ada kajian yang secara spesifik mengevaluasi bagaimana kesiapan data dan operator serta dinamika proses pencairan dan pendampingan di SD Negeri 1 Ubung, sehingga terdapat kesenjangan antara kebijakan makro dan praktik mikro di lapangan (Emsa *et al.*, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini secara khusus dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama: 1) bagaimana evaluasi aspek *input* pada Program Indonesia Pintar (PIP) di SD Negeri 1 Ubung, terutama terkait keakuratan data penerima, kesiapan operator, dan pemahaman regulasi; dan 2) bagaimana evaluasi aspek *process* pada PIP di SD Negeri 1 Ubung, khususnya mengenai ketepatan waktu pencairan, kendala akses bagi siswa, dan mekanisme pendampingan oleh sekolah. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur tentang evaluasi kebijakan pendidikan berbasis model CIPP pada tingkat sekolah dasar, sekaligus menghasilkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas implementasi PIP di daerah dengan karakteristik geografis dan sosial-ekonomi yang serupa.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif deskriptif, karena fokus penelitian diarahkan untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) berlangsung, khususnya pada aspek *input* dan *process*. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih sesuai dengan karakteristik penelitian yang berorientasi pada konteks, makna, dan proses, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2020) sebagai pendekatan yang tepat untuk menggali realitas sosial secara holistik dan kontekstual. Subjek penelitian terdiri atas kepala sekolah sebagai penanggung jawab program, operator sekolah sebagai pengelola data Dapodik, serta wali kelas yang terlibat dalam pendampingan siswa penerima PIP. Seluruh informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pendampingan PIP di SD Negeri 1 Ubung, sehingga memastikan informasi yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan terpilih, serta studi dokumentasi berupa Surat Keputusan (SK) penerima PIP, data Dapodik, buku pedoman PIP, dan arsip pencairan dana di sekolah. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, persepsi, dan praktik implementasi PIP di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memverifikasi dan memperkuat temuan dari wawancara. Analisis data menggunakan model interaktif Miles *et al.* (2014) yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

Proses reduksi data dilakukan dengan mengidentifikasi, memfokuskan, dan mengorganisasi temuan utama; penyajian data disusun dalam bentuk naratif, tabel, dan matriks untuk mempermudah interpretasi; dan penarikan simpulan dilakukan secara berkelanjutan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber informasi. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari kepala sekolah, operator sekolah, dan wali kelas, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan memadukan data wawancara mendalam dan data dokumentasi. Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan konsistensi, kredibilitas, dan keandalan informasi yang diperoleh, sehingga temuan penelitian dapat menggambarkan realitas implementasi PIP di SD Negeri 1 Ubung secara akurat dan rinci.

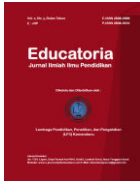
## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Evaluasi Dimensi *Input* (Sumber Daya dan Strategi)

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kesiapan administratif SD Negeri 1 Ubung dalam pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) bertumpu pada integrasi sistem digital. Proses ini dimulai dengan sinkronisasi data Dapodik siswa dengan sistem DTKS pusat. Kepala Sekolah menjelaskan dalam wawancara bahwa sekolah hanya mengikuti prosedur yang ada untuk memastikan data valid: “Kami menyesuaikan dengan sistem yang ada secara umum saja, data di Dapodik disinkronkan dengan pusat agar tepat sasaran bagi siswa kurang mampu” (Wawancara, April 2026). Hal ini menunjukkan bahwa sekolah telah menjalankan prosedur standar untuk meminimalisir risiko salah sasaran. Secara teoretis, keakuratan data merupakan fondasi utama dalam evaluasi *input*. Sejalan dengan penelitian Pradana *et al.* (2023), keberhasilan program bantuan sosial pendidikan sangat bergantung pada validitas data awal yang disinkronkan secara berkala untuk meminimalisir risiko salah sasaran (*inclusion and exclusion error*).

Dari sisi manajerial, sekolah telah membentuk struktur personel khusus yang terdiri dari operator sekolah dan wali kelas. Pembagian tugas dilakukan secara fungsional untuk menjaga kelancaran birokrasi. Operator bertanggung jawab pada teknis penginputan, sementara wali kelas melakukan verifikasi faktual. Penugasan ini sesuai dengan pernyataan kepala sekolah bahwa pengelolaan SDM dilakukan “disesuaikan pada umumnya saja” (Wawancara, April 2026), namun tetap terkoordinasi. Hal ini memperkuat kesiapan *input* dari sisi manajerial. Menurut analisis Nurhasanah & Kurniawan (2021), keberadaan pengelola program yang terstruktur dan memiliki pembagian kerja yang jelas di tingkat satuan pendidikan merupakan faktor determinan yang menentukan kelancaran birokrasi penyaluran bantuan pendidikan.

Kesiapan regulasi juga menjadi elemen krusial, dimana SD Negeri 1 Ubung telah menerima dan membedah Petunjuk Teknis (Juknis) penyaluran PIP terbaru. Pemahaman terhadap payung hukum ini menjadi panduan agar tidak terjadi malpraktik administrasi. Berdasarkan pengakuan pihak sekolah, pedoman teknis tersebut sudah dikantongi dan dipelajari. Penelitian oleh De Hert & Paula-Garcia (2024) dan Handayani (2021) menegaskan bahwa pemahaman implementor terhadap regulasi teknis adalah variabel *input* yang menentukan efektivitas



program, karena tanpa pemahaman juknis yang mendalam, pelaksanaan program di lapangan cenderung akan mengalami hambatan prosedural.

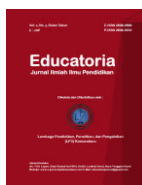
Secara fisik, sarana pendukung di SD Negeri 1 Ubung seperti komputer dan jaringan internet telah tersedia dalam kondisi memadai untuk mendukung proses verifikasi daring. Fasilitas ini menjadi penunjang utama operasional sekolah. Sesuai dengan temuan Saputra (2022), ketersediaan sarana teknologi informasi di sekolah merupakan komponen *input* fisik yang wajib dipenuhi dalam sistem evaluasi CIPP, terutama untuk mendukung akuntabilitas pelaporan program bantuan pemerintah yang kini sepenuhnya berbasis elektronik. Dalam menjangkau orang tua siswa, sekolah menerapkan strategi komunikasi melalui pemanfaatan grup *WhatsApp* per kelas. Strategi ini dirasa lebih praktis dan cepat dibandingkan surat menyurat fisik. Wali kelas berperan sebagai *admin* yang meneruskan jadwal aktivasi atau pencairan secara langsung. Penggunaan media sosial ini membantu mengatasi hambatan jarak dan waktu yang sering dialami masyarakat. Penelitian oleh Sari & Ramdani (2022) menyebutkan bahwa adaptasi strategi komunikasi melalui platform digital sangat efektif dalam meningkatkan partisipasi wali murid serta memastikan transparansi informasi program bantuan di sekolah.

Secara keseluruhan, evaluasi dimensi *input* menunjukkan SD Negeri 1 Ubung memiliki kesiapan yang komprehensif. Upaya sadar dalam menyiapkan SDM, regulasi, dan fasilitas ini merupakan langkah menciptakan ekosistem pendidikan inklusif. Hal ini selaras dengan prinsip *Stufflebeam* dalam model CIPP, bahwa evaluasi *input* harus mampu menjawab tantangan lingkungan. Sebagaimana ditegaskan oleh Mulyadi (2021), kesiapan *input* yang kuat di sekolah akan menjadi jaminan bagi keberlangsungan proses implementasi program yang lebih efektif dan efisien di tahap selanjutnya.

### **Evaluasi Dimensi *Process* (Implementasi di Lapangan)**

Tahap evaluasi proses memantau pelaksanaan rencana guna mendeteksi hambatan selama program berjalan. Di SD Negeri 1 Ubung, ditemukan bahwa aktivitas aktivasi rekening dan pencairan dana terkadang tidak tepat waktu. Masalah ini sering muncul saat masa puncak (*peak season*) pencairan, dimana sistem mengalami perlambatan. Responden menyebutkan bahwa pencairan “kadang terlambat karena kendala jaringan dan situs banyak yang menjangkau” (Wawancara, April 2026). Hal ini menunjukkan adanya diskoneksi antara regulasi pusat dengan realitas teknis di lapangan. Sejalan dengan penelitian Wijaya (2022), ketepatan waktu penyaluran bantuan pendidikan sering kali terhambat oleh faktor-faktor eksternal yang tidak terprediksi dalam fase perencanaan, sehingga memerlukan fleksibilitas dalam implementasi prosedur.

Kendala utama dalam proses ini adalah infrastruktur digital yang tidak stabil saat beban *server* pusat meningkat (*down*). Ilustrasi nyata terjadi saat banyak orang tua siswa mencoba mengakses informasi aktivasi secara bersamaan, mengakibatkan sistem verifikasi sekolah terhambat. Masalah teknis ini membuat proses menjadi tidak efisien meskipun perangkat di sekolah sudah siap. Menurut analisis Lestari & Pratama (2021), stabilitas konektivitas digital di wilayah pinggiran merupakan variabel kritis yang menentukan efektivitas pelaporan program pemerintah berbasis daring, dimana kegagalan sistem sering kali memicu penumpukan administrasi di tingkat satuan pendidikan.



Faktor wilayah juga memberikan tantangan bagi orang tua siswa dalam mencairkan dana di bank penyalur. Jarak dan keterbatasan moda transportasi sering membuat wali murid menunda proses aktivasi. Tantangan geografis ini menjadi realitas fisik yang harus dihadapi. Penelitian oleh Ramadhan (2022) menegaskan bahwa aksesibilitas lokasi perbankan merupakan faktor determinan dalam keberhasilan program bantuan sosial di daerah terpencil, dimana biaya peluang (transportasi) terkadang menjadi beban tersendiri bagi keluarga penerima manfaat yang berpenghasilan rendah.

Sekolah merespons kendala tersebut dengan memberikan pendampingan intensif. Pihak sekolah tidak hanya menunggu, tetapi juga bertindak sebagai mediator antara orang tua siswa dengan bank penyalur, terutama ketika muncul kendala administratif di perbankan. Peran fasilitator ini membantu menjembatani hak siswa agar tetap terpenuhi. Hal ini memperkuat temuan Susanto (2021), bahwa peran aktif sekolah sebagai fasilitator sangat krusial dalam menjembatani hambatan birokrasi perbankan, sehingga hak siswa untuk menerima bantuan tetap dapat terpenuhi meskipun terdapat kendala teknis dalam dokumen kependudukan.

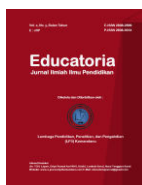
Langkah strategis lainnya adalah pelaksanaan sosialisasi preventif sebelum pencairan dana. Kepala Sekolah turun langsung memberikan edukasi tatap muka kepada wali murid agar dana digunakan hanya untuk kepentingan pendidikan. “Sosialisasi ini dilakukan melalui pertemuan, dimana saya langsung menjadi pembicara guna memberikan arahan pemakaian dana” (Wawancara, April 2026). Strategi ini menunjukkan fungsi kontrol internal yang kuat. Sebagaimana dijelaskan oleh Pratama (2021), pengawasan secara persuasif oleh pimpinan sekolah efektif dalam menekan angka penyalahgunaan dana bantuan pendidikan yang sering dialami oleh keluarga dari kelas ekonomi menengah ke bawah.

Edukasi tersebut menekankan bahwa dana PIP bukan untuk kebutuhan konsumtif rumah tangga, melainkan untuk pembelian seragam, alat tulis, dan buku. Tanpa pengawasan ketat, terdapat risiko pergeseran fungsi dana bantuan. Penelitian Arifin & Setiawan (2022) dan Fahria *et al.* (2026) mendukung hal ini dengan menyatakan bahwa literasi keuangan dan sosialisasi yang berkelanjutan merupakan instrumen penting untuk menjamin akuntabilitas penggunaan dana hibah pendidikan di tingkat masyarakat akar rumput.

Secara umum, koordinasi eksternal antara SD Negeri 1 Ubung dengan Dinas Pendidikan maupun pihak bank terjalin dengan baik. Harmonisasi ini menjadi faktor pendukung yang meminimalisir dampak kendala teknis di lapangan. Sesuai dengan prinsip model CIPP *Stufflebeam*, keberhasilan sebuah proses ditentukan oleh sejauh mana pelaksana mampu beradaptasi dengan lingkungan. Sebagaimana disimpulkan oleh Utami (2021), koordinasi lintas sektoral yang solid merupakan kunci utama dalam menjaga keberlanjutan program jaminan sosial pendidikan di tengah keterbatasan sarana dan prasarana di SD Negeri 1 Ubung.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SD Negeri 1 Ubung pada dimensi *input* telah memiliki kesiapan sumber daya yang memadai, ditandai dengan validitas data Dapodik-DTKS yang sinkron, kompetensi operator yang baik,



pemahaman regulasi yang tepat, serta pemanfaatan strategi komunikasi digital melalui grup *WhatsApp* untuk mengatasi kendala geografis. Sementara itu, pada dimensi *process*, meskipun terdapat hambatan teknis berupa gangguan jaringan internet dan tantangan jarak ke bank penyalur yang memicu keterlambatan pencairan, sekolah berhasil meminimalisir risiko penyalahgunaan dana melalui pendampingan administratif yang intensif, serta sosialisasi edukatif secara langsung oleh kepala sekolah. Dengan demikian, integrasi antara kesiapan sumber daya dan pengawasan proses yang adaptif menjadi kunci utama dalam menjaga efektivitas dan akuntabilitas penyaluran bantuan pendidikan bagi siswa di SD Negeri 1 Ubung.

## SARAN

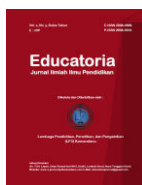
Berdasarkan hasil evaluasi, disarankan bagi pihak SD Negeri 1 Ubung untuk terus meningkatkan literasi digital orang tua murid guna meminimalisir kendala informasi akibat gangguan jaringan yang sering terjadi. Selain itu, diharapkan adanya koordinasi yang lebih intensif antara pihak sekolah dengan bank penyalur agar dapat memberikan kebijakan khusus bagi wali murid SD Negeri 1 Ubung dalam proses aktivasi rekening untuk mengurangi beban biaya transportasi. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan evaluasi pada dimensi *output* dan *product* guna melihat dampak jangka panjang Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap tingkat keberlanjutan pendidikan murid di sekolah tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah evaluasi program pendidikan atas bimbingan dan arahnya dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada kepala sekolah dan operator SD Negeri 1 Ubung yang telah memberikan izin penelitian serta bantuan data yang sangat berharga selama proses wawancara. Terakhir, terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dan orang tua yang telah memberikan dukungan moral, sehingga artikel penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Amalia, R., Anuar, A. B., & Fahmi, A. (2023). Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Efektifitas Pelaksanaan Magang Mahasiswa Bimbingan dan Konseling dengan Menggunakan Metode CIPP. *G-Couns : Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 7(2), 239–251. <https://doi.org/10.31316/gcouns.v7i02.4587>
- Arifin, Z., & Setiawan, B. (2022). Akuntabilitas Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) pada Masyarakat Pesisir. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 14(1), 45–58. <https://doi.org/10.21831/jep.v14i1.45678>
- De Hert, S., & Paula-Garcia, W. N. (2024). Implementation of Guidelines in Clinical Practice; Barriers and Strategies. *Current Opinion in Anaesthesiology*, 37(2), 155-162. <https://doi.org/10.1097/ACO.0000000000001344>
- Emsa, T., Khasanah, M., & Ellyana, C. P. (2022). Pemanfaatan Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap Motivasi Belajar pada Siswa SMP Negeri 3



- Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(3), 864–873. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i3.1046>
- Fahria, R., Mashuri, A. A. S., Hariyanti, Y., & Rosdiana, H. (2026). Literasi Keuangan bagi Pelajar. *Jurnal Wiyata Madani*, 3(1), 23-30. <https://doi.org/10.33822/jwm.v2i1.12395>
- Handayani, S. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 145–156. <https://doi.org/10.33503/jmp.v9i2.1234>
- Lestari, P., & Pratama, A. (2021). Tantangan Digitalisasi Administrasi Pendidikan di Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). *Jurnal Teknologi Informasi Pendidikan*, 11(2), 112–125. <https://doi.org/10.23917/jtip.v11i2.5678>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Edition 3). London: SAGE Publications.
- Mulyadi, A. (2021). Evaluasi Program Pendidikan Menggunakan Model CIPP: Sebuah Tinjauan Teoretis dan Praktis. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 12(1), 34–45. <https://doi.org/10.21831/jip.v12i1.9012>
- Neli, N., Syukri, M., & Chiar, M. (2019). School Policy in Supporting Indonesia Smart Program at Private Junior High School (SMP) of Santo Gabriel Sekadau. *JETL (Journal of Education, Teaching and Learning)*, 4(1), 49-58. <http://dx.doi.org/10.26737/jetl.v4i1.972>
- Nurhasanah, S., & Kurniawan, D. (2021). Peran Operator Sekolah dalam Pengelolaan Data Dapodik untuk Penyaluran Dana Bantuan Pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 8(3), 210–222. <https://doi.org/10.17509/jap.v8i3.3456>
- Pradana, D. K., Supandi, S., & Wardani, T. I. (2023). Rancang Bangun Media Pengenalan Alat Laboratorium Kimia Berbasis *Mobile Augmented Reality*. *JIPETIK : Jurnal Ilmiah Penelitian Teknologi Informasi & Komputer*, 3(2), 81–87. <https://doi.org/10.26877/jipetik.v3i2.12784>
- Pratama, M. R. (2021). Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengawal Integritas Program Bantuan Pemerintah. *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(3), 201–215. <https://doi.org/10.17977/um025v5i3p201-215>
- Ramadhan, T. (2022). Aksesibilitas Layanan Perbankan dan Dampaknya terhadap Penyaluran Bantuan Sosial di Daerah Pesisir. *Jurnal Geografi Sosial*, 7(2), 78–92. <https://doi.org/10.22146/jgs.v7i2.6789>
- Saputra, H. (2022). Infrastruktur Digital dan Aksesibilitas Informasi di Sekolah Wilayah Pesisir. *Jurnal Teknologi Pendidikan Nusantara*, 5(2), 89–101. <https://doi.org/10.31331/jtpn.v5i2.1011>
- Sari, M., & Ramdani, A. (2022). Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Komunikasi Efektif antara Sekolah dan Wali Murid di Era Digital. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 6(1), 12–25. <https://doi.org/10.32585/jkp.v6i1.2233>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Susanto, H. (2021). Peran Mediator Sekolah dalam Mengatasi Hambatan Administratif Penyaluran Beasiswa PIP. *Jurnal Administrasi Pendidikan*,



**Educatoria : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan**

E-ISSN 2808-2699; P-ISSN 2808-361X

Volume 6, Issue 2, April 2026; Page, 360-368

Email: [educatoriajurnal@gmail.com](mailto:educatoriajurnal@gmail.com)

- 
- 9(1), 33–46. <https://doi.org/10.17509/jap.v9i1.1212>
- Sutikno, C., Atika, Z. R., & Amanda, A. (2025). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 12(3), 715-727. <http://dx.doi.org/10.25157/dak.v12i3.21921>
- Utami, D. R. (2021). Sinergitas Lintas Sektoral dalam Implementasi Kebijakan Jaminan Pendidikan Nasional. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 150–163. <https://doi.org/10.31258/jkp.v12i2.7891>
- Wijaya, K. (2022). Analisis Keterlambatan Penyaluran Dana Pendidikan: Studi Kasus Implementasi PIP di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 10(1), 22–35. <https://doi.org/10.21009/jep.v10i1.12345>